

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar terlampir.

Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan”, dan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2013 – 2018 adalah **”TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT”**,maka untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima menyusun Renja SKPD Tahun 2017. Renja SKPD ini diharapkan dapat terealisasi maksimal dalam KUA dan PPAS untuk kemudian digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
21. Keputusan Walikota Bima Nomor 506 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima tahun 2015.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2017, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2017 *(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

No	SASARAN MISI				TARGET					TARGET PENCAPAIAN						
	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	Target Renstra	Capaian tahun sebelumnya (2014)	% Capaian tahun sebelumnya	capaian tahun 2015	% Capaian tahun 2015	Capaian sampai dengan tahun 2015	% Capaian sampai dengan tahun 2015
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			15			16
1	Terwujudnya Tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh Bencana	Kelurahan tangguh	6	15	20	25	38	38	6	100	15	100	15	39,47
2	Terwujudnya Peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	150	180	180	180	180	870	197	131,33	204	113,33	401	46,09
		Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	70	75	80	85	90	80	0	0,00	3,33	3,33	3,33	3,33
3	Terwujudnya Penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	Dokumen	3	2	1	2	2	10	3	100,00	3	150	6	60,00

4	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara tepat dan cepat	Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran	Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran	Menit	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	> 15	93,4	> 15	95	> 15	94,00
		Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%	87	90	95	95	95	92,4	79,28	91,13	79,28	88,09	79,28	85,80
		Porsentase mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	Porsentase mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	%	90	90	95	95	95	93	100	111,11	100	111,11	100	107,53
5	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencan	Porsentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencan	%	50	60	70	80	90	70	5	10,00	55	91,667	55	78,57
												82,00		106,15		76,43

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

**Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima
Periode tahun 2014 dan tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016**

Nomor	Indikator Capaian			
	Indikator Capaian	Penjelasan	Satuan	Targe Renst
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelurahan tangguh Bencana	Kelurahan tangguh	38
2	Terwujudnya Peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Orang	870
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	80
3	Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah Dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	Dokumen	10
4	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	Ketepatan Waktu Tnggap Darurat Bencana Kebakaran	Menit	< 15 Menit
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	92.4
		Persentase mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 - 5.000 Ltr pada WMK	%	93
5	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	%	70
Rata - rata				

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (S1): Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target sasaran strategi 1 (S1) sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 38 Kelurahan. Maka jika dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Kelurahan maka total realisasi Sasaran strategi (S1) pada tahun 2014 adalah 6 kelurahan dari target sasaran 6 kelurahan (100 %) sedangkan pada tahun 2015 sasaran strategi (S1) yang tercapai sebanyak 15kelurahan dari target sasaran 15 kelurahan (100%). Maka capaian sasaran strategi (S1) kalau diprosentasikan sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 39,47%. Capaian ini cukup besar mengingat pelaksanaan renstra periode tahun 2014-2019 baru berjalan 2 tahun.

Dalam proses pembentukan Kelurahan Tangguh di masyarakat, rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan PCVA (Partisipatory capasitas and vulnerability Apraisal) untuk mendapatkan informasi awal tentang kapasitas, kerentanan yang ada di kelurahan
2. Mengkaji Lebih mendalam tentang Kapasitas dan kerentanan terhadap ancaman yang ada di kelurahan
3. Bersama masyarakat menyusun SOP dan Rencana Aksi masyarakat
4. Membentuk Relawan penanggulangan bencana

Output yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut adalah terdiri dari :

- a. Dokumen Analisa Risiko bencana
- b. Dokumen Rencana Aksi Masyarakat
- c. Penetapan Jalur Evakuasi di Kelurahan/SOP Peringatan Dini Bencana
- d. SK Relawan Kelurahan (TSBK)

Tujuannya adalah masyarakat dapat mengenali potensi ancaman yang ada di masyarakat, menganalisa kerentanan yang dimiliki dan kapasitas sebagai sumber daya yang mendukung daya lenting kembali jika terjadi bencana. Sehingga masyarakat secara mandiri melakukan upaya awal untuk penyelamatan diri dan keluarga sebelum pihak lain datang membantu.

Kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembentukan kelurahan tangguh adalah terbatasnya SDM di BPBD, namun antisipasi yang dilakukan adalah menggandeng Forum PRB Mbojo Matenggo untuk menjadi tenaga fasilitator menambah fasilitator yang tersedia di BPBD.

Kegiatan pembentukan kelurahan tangguh dapat terlaksana karena adanya dukungan yang cukup besar dari berbagai pihak, seperti Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima, BNPB melauai program bantuan pembentukan kelurahan tangguh bencana dan BPBD Provinsi. Program bantuan

pembentukan Kelurahan tangguh bencana Provinsi NTB, pengelolaan dananya langsung oleh BPBD Provinsi, BPBD Kota Bima hanya menyiapkan Lokasinya, Sementara bantuan dari BNPB, pengelolaan anggarannya dilakukan oleh BPBD Kota Bima.

Rangkaian program yang didukung oleh BNPB dan BPBD Provinsi NTB merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dan pusat terhadap Program Kota Tangguh yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bima, melalui dukungan kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan pihak Donor baik dengan JICA Jepang maupun dengan OXFAM, beberapa kali Pimpinan Pemerintah Kota Bima bersama kepala Pelaksanan BPBD menjadi utusan ke Jepang, Thailan, dan Singapura, dan menjadi pembicara pada pertemuan internasional dengan kedutaan -kedutaan dunia. Program ini juga menjadi program kerjasama antara pemerintah Kota Bima dengan pihak donor OXFAM Indonesia yang membawa Kota Bima menjadi Nominator Kota Tangguh dunia mewakili Indonesia di ajang internasional.

Untuk mendukung program Kota Tangguh yang dicanangkan BPBD Kota Bima, tentunya banyak upaya yang dilakukan baik pra bencana, saat bencana /tanggap darurat maupun pasca bencana, sehingga selain Program Kelurahan Tangguh, Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaiannya dalam melakukan pelayanan bantuan kepada masyarakat korban bencana adalah melakukan upaya tanggap darurat. Upaya tersebut berupa pemberian bantuan uang tunai, logistik maupun bantuan perbaikan darurat terhadap sarana fisik maupun non fisik sesuai jenis kerusakan atau kerugian yang diderita korban bencana. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Pemenuhan sandang pangan, Pemenuhan Air bersih dan sanitasi yang tersedia dalam DPA BPBD Kota Bima dan Anggaran Dana tak terduga yang ada pada DPKAD.

2. Sasaran Strategis 2 (S2):Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana. Pencapaian sasaran strategis 2 ini dapat dicapai melalui 2 (dua) indikator sasaran strategis yaitu :

1. Jumlah SDM yang Terlatih (S2.1)
2. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (S2.2)

2.1 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2.1): Jumlah SDM yang terlatih

Dari uraian tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa pada tahun 2014 target kinerja Stategis 2 (S2) sebesar 150 Orang terlatih dan dapat terealisasi sebanyak 197 orang terlatih yang berarti prosentase ketercapaiannya sebesar 131,33% melampaui target kinerja. Ini berarti bahwa angka

ketercapaian kinerja pada strategi 2 (S2) pada tahun 2015 target kinerja Strategis 2 (S2) sebesar 180 Orang terlatih dan dapat terealisasi sebanyak 204 orang terlatih yang berarti prosentase ketercapaiannya sebesar 133,33% melampaui target kinerja sedikit lebih kecil dari angka ketercapaian kinerja pada tahun 2014 namun rata-rata kinerja pada tiga tahun terakhir sasaran utama pada S2 tetap melampaui target kinerja.

Sampai dengan tahun 2015 pencapaian target rencana strategis tahun 2014-2015 telah mencapai 401 orang dari target total sebanyak 870 orang atau sebesar 46,09 %. Ketercapaian ini berarti ketercapaian yang cukup besar mengingat target lima tahunan renstra baru berjalan 2 tahun namun angka ketercapaian renstra hampir mencapai 50% atau setengahnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penanggulangan bencana untuk 10 langkah mendasar dalam upaya – upaya penanggulangan bencana, salah satu point penting yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah adalah bagaimana upaya peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai unsur pelaku penanggulangan bencana. Untuk mendukung ketercapain Strategi 2 (S2) ini selain dilakukan melalui dana pada DPA BPBD tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sangat konsen dengan upaya – upaya peningkatan sumber daya manusia baik sumber daya aparatur pemerintah maupun Tim Penanggulangan bencana lainnya dan masyarakat relawan penanggulangan bencana. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja strategi 2 (S2). Selain didukung melalui program – program yang ada pada DPA BPBD Kota Bima, dukungan juga datang dari program –program kerjasama dengan pihak donor Internasional yaitu OXFAM Indonesia yang bermitra dengan LSM Lokal LP2DER melalui program membangun ketangguhan masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kota Bima, disamping itu Program kerjasama dengan JICA (Japan International Consultan Asosiation) yang mendorong lahirnya Dokumen Analisa Risiko Bencana tahun 2015 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan output lain dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang memberikan sumbangsih terhadap pencapaian sasaran strategis 2 (S2).

2.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 (S2.2): Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (S2.2)

Angka ketercapaian Sasaran Strategis (S2.2) adalah sebanyak 1 (satu) orang dari 30 orang anggota pemadam kebakaran atau 3,33% dari target 75%. Hal ini disebabkan antara lain karena Selama ini petugas pemadam kebakaran tidak pernah dilatih secara professional dan diuji kemampuannya oleh petugas professional khusus sehingga tidak ada satu petugas pun yang mendapat sertifikat keahlian. Karena tenaga pemadam kebakaran yang ada

pada Badan penanggulangan Bencana Kota Bima sebelumnya adalah tenaga Honor Daerah dan tidak memiliki keterampilan dan kompetensi khusus dalam hal penanganan bencana kebakaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi sasaran strategis S4.4 pada tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Realisasi tahun 2014 sebesar 0 orang atau 0 %, karena tidak ada satu orangpun yang mendapat sertifikat keahlian. Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran selama ini petugas PMK hanya belajar otodidak, *learning by doing* (belajar langsung dilapangan pada saat kejadian) serta berbagi pengalaman dari senior di kalangan Petugas pemadam kebakaran sendiri, selain itu penggolongan pejabat dan petugas pemadam kebakaran belum mengikuti aturan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009, Petugas Pemadam kebakaran BPBD Kota Bima digolongkan dalam tugas Koordinator pemadam kebakaran, Komandan Regu, Pemegang selang, pemegang Nozzel, operator dan Supir/caraka mobil pemadam sehingga dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran kurang maksimal tidak sesuai yang diharapkan dalam target pencapaian target sebesar 75% di tahun 2015 ini, Selain dua hal di atas Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran saat ini adalah sebagai Satuan tugas Pemadam kebakaran berada diluar struktur Organisasi BPBD sehingga dalam pengembangan baik kelembagaan maupun Sumber Daya manusia sangat terbatas.

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (S3): Jumlah Dokumen yang tersedia

Dari uraian tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa realisasi pencapaian target kinerja sasaran (S3) pada tahun tahun sebelumnya, terdapat tren yang semakin meningkat, pada tahun 2014 target kinerja S3 ini dapat terealisasi 100% (Seratus Persen) dari target 3 instrumen penanggulangan terealisasi 3 instrumen yaitu terbitnya 1 Dokumen Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Dokumen SOP Penanggulangan bencana serta dokumen analisa cakupan lokasi dan jumlah korban sebagai bahan pengambilan kebijakan penanganan tanggap darurat bencana.

Sampai dengan tahun 2015 realisasi sasaran strategis 3 (S3) ini adalah sebanyak 6 dokumen lebih besar dari pada target renstra. Target renstra sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 5 dokumen yang berarti prosentase ketercapaian rencana strategis adalah 60% dari target 5 tahunan.

Penyusunan Draf Rencana Penanggulangan Bencana sebenarnya telah tersusun pada tahun 2013 yang lalu namun disempurnakan kembali pada tahun

2015 dengan melibatkan lebih banyak tim dari SKPD terkait sehingga tersusun Dokumen RPB yang lebih representatif dibandingkan dokumen sebelumnya.

Proses penyusunan Dokumen RPB ini cukup mendapat tantangan, karena penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD telah berjalan satu tahunan dan secara eksplisit belum secara maksimal mengakomodir program – program penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. Maka untuk mengintegrasikan program – program penanggulangan bencana menjadi bagian dari rencana kerja SKPD adalah mendorong lahirnya RPJMD Revisi pada tahun 2015 melalui rapat – rapat koordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait lainnya. Meskipun RPJMD Revisi tidak bisa tuntas di tahun 2015.

Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyusunan dokumen ini adalah kurangnya SDM yang tersedia, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara BPBD Kota Bima membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen yang berasal dari Dinas terkait dan menggandeng Forum PRB Mbojo Ma tenggo yang memiliki SDM yang cukup sebagai mitra kerja BPBD dalam upaya pengurangan Risiko Bencana. Upaya tersebut cukup efektif menyelesaikan tugas – tugas teknis, yang kemudian hasil yang dicapai pada tingkat teknis dikoordinasikan kembali pada tingkat lebih tinggi yaitu melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi SKPD yang juga dibentuk untuk mempermudah koordinasi lintas SKPD terkait.

Dokumen peraturan yang dihasilkan adalah Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, dengan tujuan bahwa Dokumen tersebut dapat menjadi pedoman yang terpadu bagi stakeholder dalam menyusun rencana kerja organisasi dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana di Kota Bima. Maka langkah awal yang dilakukan SKPD terkait adalah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan masing-masing SKPD.

Dokumen lain yang dihasilkan adalah Peraturan Walikota Bima Nomor 48 tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja langsung APBD, aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan daerah Kota Bima Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Melalui Peraturan Walikota ini pemerintah Kota Bima memiliki komitmen yang cukup besar dalam mendukung program – program penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain dokumen tersebut diatas hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut

adalah tersusunnya dokumen perwali tentang mekanisme penggunaan dana tak terduga APBD yang telah mengakomodir Permendagri Nomor 13 tahun 2011 dan Perpres nomor 54 tahun 2014.

Jika dilihat dari sisi penggunaan sumber daya baik dana maupun SDM, ketercapaian target ini memakan biaya yang cukup besar karena untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan pengorbanan yang besar pula, sehingga hasil akhir yang dicapai adalah selain dokumen tersedia, outcome dari kegiatan ini adalah semakin banyak stakeholder pemangku kepentingan memahami konsep penanggulangan bencana dan mengambil peran penting dalam upaya – upaya penanggulangan bencana. Tercapainya target kinerja sasaran (S3) ini sangat didukung oleh ketercapaian target kinerja (S1) seperti kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan karena kegiatan ini selain memiliki out put terlatihnya utusan/counterpart dalam penanggulangan bencana, juga menghasilkan Dokumen Draf Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Analisa Risiko yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator dari JICA yang kemudian dokumen tersebut disempurnakan lagi hingga mendapatkan legalisasi hukum yang difasilitasi OXFAM Indonesia melalui Mitra kerja LP2Der Bima.

4. **Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (S4): Mendorong terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat, tepat dan efektif terkoordinir dan terpadu. Pencapaian sasaran strategis 4 ini dapat dicapai melalui 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu :**

1. Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran (S4.1)
2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran (S4.2)
3. Persentase mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (S4.3)

4.1. Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran (S4.1)

Badan penanggulangan bencana daerah Kota Bima selain sebagai SKPD yang menangani bencana, juga bertanggung jawab pada urusan wajib perumahan yaitu pada urusan pencegahan bahaya kebakaran. Merujuk pada SPM bidang Pemerintahan dalam Negeri, Pemerintah Kota Bima menetapkan Peraturan Walikota Bima nomor 37 Tahun 2013 tentang Standar pelayanan minimum bidang Pemerintahan dalam Negeri Pemerintah Kota Bima. maka untuk melaksanakan fungsi tersebut BPBD Kota Bima menetapkan sasaran strategis 4.2 ini sebagai upaya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum bidang Pemerintahan dalam Negeri seperti yang dijelaskan di atas.

Sebelum dijelaskan tentang capaian pada sasaran strategis 4.1 (S4.1) ini, perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang waktu tanggap pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

1. **Respon time (waktu tanggap)** adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.
3. Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:
 - a. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
 - b. WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
 - c. WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Tugas penanggulangan bencana kebakaran merupakan salah satu dari beberapa bencana yang sering terjadi di Kota Bima, untuk itu sebagai SKPD yang menangani tugas kebencanaan harus berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha memberikan pelayanan dasar pada masyarakat terutama bagi korban bencana. Secara umum kebakaran yang sering terjadi selama tahun 2015 adalah kebakaran pemukiman (rumah warga), tercatat 17 kasus kebakaran yang terjadi pada wilayah pemukiman yang 3 (tiga) kejadian diantaranya menimbulkan korban jiwa yaitu :

- Kebakaran yang terjadi di BTN Rontu Kelurahan Panggi dimana terdapat satu orang korban meninggal an. Julkifli Umur 32, pada saat petugas pemadam sampai dilokasi dan melakukan pemadam korban telah ditemukan meninggal dunia disebabkan korban tidak bisa menemukan jalan keluar dan korban teridentifikasi mengalami gangguan jiwa/stress
- Kebakaran yang terjadi di lingkungan Rato Kelurahan Rabadompu Barat, satu orang meninggal dunia an. Gamal Abdul Naser bin Sulaiman usia 35 tahun. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bima sesaat setelah dibawa ke RSUD bima karena mengalami luka bakar yang cukup parah, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar korban sengaja mengunci dirinya dalam kamar terindikasi korban mengalami stress dan mengidap penyakit epilepsy/ayan
- Kebakaran yang terjadi dilingkungan Tolo Dara Kelurahan Dara satu orang meninggal dunia an. Sang Putra Abdul Haris usia 6 tahun, korban

yang tertidur di kunci oleh orang tuannya, pada saat kejadian berada sendirian dirumah karena kedua orang tuanya membuka kios di areal terminal bima.

Disamping kejadian kebakaran yang melanda daerah pemukiman terdapat 1 kasus kejadian kebakaran besar yang melanda Ruko pada pusat pertokoan bima yang proses pemadamannya memakan waktu yang cukup lama karena disamping sebagai toko dan tempat tinggal bangunan tersebut berfungsi juga sebagai gudang tempat penyimpanan berbagai macam barang pecah belah yang tersimpan dalam ruangan-ruangan yang disekat berdasarkan jenis barang sehingga menyulitkan petugas untuk mencapai titik api di lantai 2 bangunan tersebut. Ada pula 8 (delapan) kasus kebakaran lahan / tegalan di areal pegunungan dengan lokasi di kelurahan Kolo terjadi 5 (lima) kali kebakaran lahan gunung, Kelurahan Dara satu kali terjadi kebakaran gunung londa, kemudian masing-masing satu kali kebakaran lahan gunung pada Kelurahan Jatiwangi dan Lampe. Satu kasus kebakaran kios kaki lima dan satu kasus lagi kebakaran mobil. Jadi total kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2015 adalah sebanyak 28 kejadian atau turun sebanyak 7 kasus (setara 84%) dari kejadian tahun 2014 yang 33 kejadian.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sasaran strategis S4.1 ini dapat direalisasikan sebesar 93,4 % dari target tahun 2014 sebesar 93 % atau tercapai 101.01 % sedangkan pada tahun 2015 sasaran strategi S4.1 ini dapat direalisasikan sebesar 95 % atau tercapai 100 % yang berarti angka ketercapaiannya sedikit lebih kecil yaitu selisih 1,01% saja, Program yang mendukung ketercapaian ini adalah Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan ini selain mendukung Sasaran strategis S4.1 juga mendukung sasaran strategis S4.2 dan S4.3 dan S4.4 yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain setelah ini.

4.2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran (S4.2)

Seperti pada sasaran strategis S4.2 pada tahun 2014 adalah sebesar 79,28 % dari target 87 % yang berarti angka ketercapaiannya adalah 91,13 %. Realisasi sasaran strategis S4.2 pada tahun 2015 adalah sebesar 79,28 % dari target 90 % yang berarti angka ketercapaiannya adalah 88,09 %. Hal ini disebabkan oleh adanya wilayah – wilayah yang belum terproteksi atau terlindungi dari bencana kebakaran sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran relative rendah. Cakupan pelayanan bencana kebakaran juga merupakan upaya untuk mendukung ketercapaian standar pelayanan minimum pemerintah Kota Bima dalam pelayanan pencegahan bahaya kebakaran.

Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran dihitung berdasarkan jangkauan luas Wilayah manajemen kebakaran dibagi luas wilayah secara keseluruhan dikali seratus persen. Jangkauan Luas WMK Kota Bima adalah 176,26 m² dengan perkiraan radius wilayah atau daerah layanan adalah 7,5 km, sedangkan luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km². Sehingga diperkirakan ada beberapa wilayah yang tidak terproteksi dari bencana kebakaran seperti Kelurahan Nitu, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Kolo sebagian Kelurahan Ntobo dan sebagian Kelurahan Dara (lingkungan Niu). Dengan begitu realisasi ketercapaiannya adalah tidak tercapai.

4.3. Persentase mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK (S4.3)

Untuk menghitung Sasaran strategis (S4.3) : Jumlah Mobil Pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK adalah Jumlah WMK memiliki mobil/mesin yang laik pakai dibagi Jumlah WMK/Lingkungan dan /Kawasan berpotensi kebakaran di kalikan 100%. Pencapaian sasaran strategis S4.3, BPBD Kota Bima mampu merealisasikan sebesar 100% dengan target pencapaian sebesar 90%, artinya angka ketercapaiannya adalah lebih dari 100% ini berdasarkan asumsi ketersediaan jumlah armada Pemadam kebakaran yang ada. Berdasarkan Data Asset BPBD Kota Bima bahwa BPBD memiliki 4 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan rincian kondisi mobil sebagai berikut :

- 1 unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 6000 liter merk Isuzu tahun pembelian 1982 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima
- 1 unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 3000 liter merk Isuzu tahun pembelian 1989 masih hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima
- 1 unit mobil pemadam kebakaran Kapasitas 3000 liter merk Mitsubishi pembelian tahun 2004 dengan menggunakan APBD Pemerintah Kota Bima
- 1 unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 5000 liter beserta merk Hino pembelian tahun 2015 dengan menggunakan APBD Pemerintah kota Bima.

Melihat kondisi umur mobil mobil tersebut yang tiga diantaranya di atas sepuluh tahun walaupun biaya perawatan dan pemeliharaan untuk mobil mobil tersebut cukup memadai namun tidak dapat dipungkiri 2 (dua) unit mobil yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima kondisinya sudah tidak maksimal dan sering dilakukan service namun tidak memadai karena beberapa spare partnya sangat sulit diperoleh.

5. **Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 (S.5): Porsentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik dan non fisik yang rusak pasca bencana**

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa tingkat realisasi sasaran strategis 5 (S.5) pada tahun 2014 adalah sebesar 5 % atau tidak tercapai, yang berarti bahwa tingkat capaian sasaran strategis 4.2 ini pada tahun 2015 jauh lebih besar dibandingkan capaian tahun 2014, hal ini berarti tingkat capaian koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan dinas teknis terkait cukup berhasil. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan penganggaran yang cukup, 8 paket penanganan pasca bencana adalah dilakukan oleh BPBD sendiri melalui Kegiatan mitigasi bencana pada program pencegahan/penanggulangan bencana. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi program rekonstruksi juga mendukung ketercapaian sasaran ini karena output kegiatan monitoring dan evaluasi adalah disamping dokumen hasil analisa kerusakan pasca bencana juga melakukan koordinasi langsung hasil analisa tersebut kepada dinas teknis terkait agar dapat mengakomodir program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kedalam Program dan kegiatan dinas terkait baik pada Penggaran Perubahan tahun yang berjalan atau pada program kerja tahun berikutnya.

Program lain yang mendukung adalah Program Penyuluhan dan penanggulangan bencana pada kegiatan Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait. Diklat ini out putnya adalah memberikan pelatihan bagi SKPD terkait tentang DALA (Perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana). Pada tahun 2015 kegiatan diklat ini memberikan dampak positif karena Tim Fasilitator berasal dari BNPB yang juga menjadi Tim Ferifikasi proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kota Bima yang diajukan pada tahun 2014 yang lalu. Sehingga hasil Lapangan pada kegiatan pelatihan tersebut menjadi bahan untuk ferifikasi proposal menentukan keberlanjutan proses persetujuan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang ada di BNPB.

Dalam proses pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strateegis ini secara teknis di lapangan sering menemui kendala seperti keterbatasan anggaran APBD menyebabkan terbatasnya jumlah paket yang bisa ditangani atau berkurangnya volume yang harus dikerjakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka yang dilakukan adalah dengan membuat daftar prioritas program dan mendorong program dan kegiatan tersebut tetap berkelanjutan masuk pada Rencana Kerja SKPD terkait pada tahun tahun berikutnya. Upaya lain yang dilakukan adalah mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke BNPB karena anggaran untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana membutuhkan biaya yang cukup besar sementara daerah memiliki keterbatasan anggaran.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Tingkat kinerja pelayanan BPBD selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tingkat capaian kinerja BPBD selama tahun 2015 rata – rata sebesar 77,45 %, jika dibandingkan dengan tahun 2014 tingkat capaiannya sebesar 74,25 % hal ini terjadi peningkatan capaian kinerja yang tinggi karena memasukkan unsur bantuan donor ke dalam kinerja SKPD. Capaian tahun 2015 sebesar 77,45 % melampaui target tahun yang bersangkutan. Dalam rangka pelayanan kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2015 didukung oleh 64 pegawai yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil dan 23 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut:

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 25 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	41	64,06
2	CPNSD	-	
3	Honorer	23	35,94
	Total	64	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan :

- a. Golongan :

Tabel 2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS/NON PNS	CPNS
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	19	-
3	Golongan II	18	-
4	Golongan I	0	-
5	Non Golongan	23	
	Total	64	-

b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
	Jumlah	14

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	-	
2	S2	4	9,76
3	S1	16	39,02
4	D3	1	2,44
5	SMA/Sederajat	20	48,78
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	41	100

Berdasarkan analisa kebutuhan personil bagi instansi, jumlah personil tersebut masih terbatas untuk melayani kebutuhan masyarakat, Analisa kebutuhan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Sudah Terisi	Belum Terisi	Keterangan
1.	Kepala Pelaksana	√		
2.	Sekretaris	√		
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	√		
	Staf	√		Kurang 2 org
	b. Kasubag Keuangan	√		
	Staf	√		Cukup
	c. Kasubag Program	√		
	Staf	√	√	Kurang 1 org
3.	Kabid Pencegahan dan	√		

	Kesiapsiagaan			
	a. Kasi Pencegahan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Kesiapsiagaan	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	√		
	a. Kasi Tanggap Darurat	√		
	Staf	√		Kurang 1 org
	b. Kasi Logistik	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	√		
	a. Kasi Rehabilitasi	√		
	Staf		√	Kurang 1 org
	b. Kasi Rekonstruksi	√		
	Staf		√	Kurang 2 org

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program kerja BPBD;
2. Kurangnya Tenaga /Personil sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa diselesaikan dengan cepat sehingga menghambat semua kegiatan;

3. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas – tugas pasca bencana

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Koordinasi yang masih parsial dengan beberapa stakeholder sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
2. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal terutama pada fungsi pemadam kebakaran;
3. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik;
5. Keterlambatan pencairan dana terutama dana tak tersangka sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kedaruratan bagi korban bencana.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
2. Belum adanya pemahaman yang sama terhadap penanggulangan bencana menyebabkan terhambatnya pencapaian sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang mandiri

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Tantangan

- Terjadinya ancaman bencana yang cukup tinggi
- Sarana Prasarana pendukung kelancaran pekerjaan pelayanan kurang memadai
- Pendanaan masih kurang memadai
- Masih adanya ego sektoral

Peluang

- Semangat mau bekerja sangat tinggi
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang terbukti dengan lahirnya Perda Penanggulangan Bencana yang tertuang di dalamnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana minimal 1 % dari belanja langsung APBD untuk anggaran penanggulangan bencana
- Kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitasnya
- Adanya dukungan dari SKPD terkait dalam menyelesaikan tugas tugas pelayanan kedaruratan

- Terbentuk dan aktifnya Forum PRB “Matenggo” Kota Bima dan TSBK di 15 Kelurahan.
- Mulai adanya keikutsertaan Lembaga usaha dalam rangka penanggulangan bencana yang dulu hanya focus pada tanggap darurat akan tetapi sekarang mulai memperhatikan program – program penanganan pra dan pasca bencana

Kekuatan

- Dukungan dan persetujuan Pemerintah terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang relative baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintah Kota Bima melalui Tim Teknis dan Tim Koordinasi SKPD Terkait Kota Bima;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;
- Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BPBD Kota Bima
- Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima
- Adanya legalisasi Peraturan walikota Bima tentang pemanfaatan dana tak terduga
- Adanya legalisasi peraturan Walikota Bima tentang pedoman Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD
- Adanya Legalisasi Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Kelemahan

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan BPBD terutama kegiatan Pasca Bencana
- Kurangnya Kuantitas dan kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih Kurangnya aturan – aturan turunan daerah tentang penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

5. Isu-Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha – usaha pengurangan risiko bencana

- Masih kurangnya legitimasi hukum peraturan – peraturan turunan Peraturan daerah Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mengatur tata kelola manajemen pengurangan resiko bencana di Daerah
- Masih kurangnya dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana
- Terbatasnya anggaran Penanganan Pasca Bencana mengingat biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat besar

6. Rekomendasi – rekomendasi dan catatan strategis

- Perlunya peningkatan SDM aparatur, Tim Penanggulangan Bencana dan masyarakat melalui Pelatihan structural, pelatihan fungsional, penyuluhan penanggulangan bencana dan pelatihan dan gladi/simulasi bencana, termasuk peningkatan kompetensi aparatur Pemadam kebakaran
- Mendorong pelaksanaan Rencana aksi daerah penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah rangka meningkatkan komitmen semua pihak baik swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana (Pra bencana , Tanggap darurat dan pasca bencana);
- Memperbesar anggaran penanggulangan bencana terutama pada program – program Pengurangan Risiko Bencana karena investasi yang besar pada program pengurangan risiko bencana akan dapat menghemat anggaran 4 – 7 kali lipat dibandingkan biaya yang keluar untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian jika bencana telah terjadi
- Perlunya pengintegrasian yang maksimal terhadap program Pengurangan Risiko Bencana kedalam RKPD Kota Bima sebagai upaya mengurangi dampak bencana mengingat tingginya ancaman bencana di Kota Bima terutama bencana banjir dan tanah longsor
- Terus melakukan program menuju ketangguhan bencana sebagai upaya peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat ditingkat paling bawah dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana.
- Terus melakukan koordinasi sektoral untuk meningkatkan upaya – upaya baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013 – 2018 yang sedang berjalan, berdasarkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan selanjutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD yang kemudian setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan menjadi acuan penyusunan RKPD . Terkait dengan

Program kerja pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, RPJMD tahun 2014-2018 secara signifikan telah menetapkan Program Pengurangan Risiko Bencana pada Program prioritas Daerah, Di Dalam dokumen Draf RKPDP tahun 2017 telah menuangkan program penanggulangan bencana sebagai program prioritas ke 8 yaitu ***Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim***, hal ini menjadi catatan bagi BPBD sebagai leading sector terkait penanggulangan bencana harus berjuang keras untuk mendukung dengan langkah – langkah program yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat baik sebelum, saat bencana maupun pasca bencana.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan tahun 2016 Badan Penanggulangan bencana daerah telah banyak menerima usulan program dan kegiatan Masyarakat baik yang secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat maupun melalui Surat dan Proposal, Hasil kunjungan Dewan dan Pertemuan Forum SKPD. Berdasarkan hasil pertemuan forum SKPD dalam rangkaian musrembang untuk sinkronisasi program butem up dan top down, sebagian besar program yang diajukan masyarakat dapat terakomodir dalam program Renja BPBD ini mengingat isu – isu yang diangkat hampir sama namun belum terpenuhi hingga 100%. Selain itu program pembentukan kelurahan tangguh yang dilaksanakan sejak tahun 2014 telah melahirkan Dokumen rencana aksi masyarakat, dimana dokumen tersebut memuat program dan kegiatan pengurangan risiko bencana terutama pada kelurahan yang telah terbentuk menjadi kelurahan tangguh. Sebagian besar rencana aksi masyarakat tersebut telah disampaikan melalui musrembang tingkat Kelurahan maupun tingkat kecamatan dan menjadi issue penting yang ditindak lanjuti BPBD melalui rencana kerja ini.

Program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah antara lain :

1. Program Penanganan bencana banjir yang kerap terjadi dan sering menggenangi disebagian besar Wilayah Kota Bima;
2. Bronjongisasi di sepanjang sungai : seperti Wilayah Manggemaci, Paruga (Sungai Padolo), Wilayah Dodu (Sungai Dodu), Wilayah SambinaE (Sungai SambinaE);
3. Perbaiki Drainase di Sebagian besar Wilayah Kota Bima.

4. Pembuatan sumur resapan di beberapa lokasi rawan banjir dan kekeringan.
5. Normalisasi sungai Padolo, sungai romo, Sungai Dodu dll.
6. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
7. Pembangunan drainase
8. Penanganan darurat bencana yang terjadi seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin kencang dll
9. Penghijauan di daerah hulu

Program dan kegiatan yang bersifat fisik adalah merupakan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan SKPD teknis seperti Dinas PU Pertamben, Dinas kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan dinas teknis terkait lainnya, sehingga tugas BPBD Kota Bima adalah mengkoordinasikan tugas tugas tersebut dengan SKPD terkait sedangkan tugas penanggulangan bencana non fisik didorong untuk masuk menjadi rencana kerja BPBD tahun 2017 yang tertuang dalam matriks rencana kerja ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , maka visi BNPB adalah :

“KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA”. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.

Pernyataan visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan bencana memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah , yaitu:

- a. Pelaksanaan Penanganan sebelum terjadi bencana yang meliputi kegiatan :
 - 1) Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana
 - 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - 3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- b. Pelaksanaan Penanganan pada saat terjadi bencana yang meliputi kegiatan :
 - 1) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - 2) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana
 - 3) Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah yang terkena bencana
- c. Pelaksanaan Penanganan setelah terjadi bencana yang meliputi kegiatan :
 - 1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - 2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

2. Rencana Strategis BPBD Provinsi NTB

Visi BPBD Provinsi NTB adalah Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang selalu waspada, selalu tanggap dan sigap terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat dilaksanakan melalui 3 misi yaitu:

1. Membangun dan menyelenggarakan system penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan
2. Meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan instansi terkait
3. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ini maka tujuannya adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana

3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
5. Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

3.2.2. Sasaran Strategis

Di dalam mewujudkan Visidan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima maka ada 5 (Lima) sasaran strategi yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana
3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
5. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Kinerja BPBD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan tahun 2017 maka ditetapkan rencana kinerja BPBD tahun 2017 sesuai table berikut :

RENCANA KINERJA BPBD TAHUN 2017

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	3	4	6
1.	Terwujudnya tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	15 Kelurahan
2	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang terlatih	180 orang
		Porsentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	75 %
3.	Terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	2 Dokumen
4.	terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Ketepatan waktu tanggap darurat bencana kebakaran	15 menit
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90%
		Presentase mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	90%
5.	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Prosentase Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	60%

3.3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan rencana kinerja dan indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima serta telaahan isu – isu strategis serta rekomendasi - rekomendasi dan catatan strategis maka dapat tindak lanjuti melalui 15 program dan 45 kegiatan selama tahun 2017

Program pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana
6. Program Penanggulangan bencana/ pencegahan bencana
7. Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
8. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
9. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Program Rehabilitasi
11. Program Rekonstruksi
12. Program Kesiapsiagaan:
13. Program Peringatan Dini.
14. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
15. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Program dan kegiatan dapat dilihat pada Matrik Rencana Kerja BPBD Kota Bima Tahun 2017 pada lampiran RENJA ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba-Bima, Maret 2016
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bima
Kepala Pelaksana

Ir. H. Sarafuddin, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640715 199203 1 017